

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2013

TANGGAL 11 MARET 2014

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 27 ayat (2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 23 peraturan pemerintah dimaksud bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan informasi dari Pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, dapat lebih

meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya implementasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan SKPD tahun 2013, sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015.

Dalam konteks inilah sebagai wujud dari kewajiban kontitusional tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Ternate Tahun Anggaran 2013, dengan format dan sistematika sebagai berikut :

**BAB I    Pendahuluan**

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Daerah

**BAB II   Kebijakan Pemerintahan Daerah**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

**BAB III  Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Pengelolaan Belanja Daerah

**BAB IV  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

**BAB V   Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

**BAB VI  Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

- A. Kerjasama Antar Daerah
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
- D. Pembinaan Batas Wilayah
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

**BAB VII  Penutup**

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Isu Strategis dan Permasalahan Khas Perkotaan**

Sebelum masuk pada pembahasan kebijakan pemerintah daerah, yaitu implementasi terhadap pelaksanaan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Ternate Tahun 2013. Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu permasalahan atau isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
  - Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
  - Kualitas perencanaan teknis dan pengawasan lapangan masih rendah, sehingga berimplikasi pada beberapa program/ kegiatan yang tidak terealisasi tepat waktu.
  - Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.
  - Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik, sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor mata rantai birokrasi yang panjang.
  - Tugas dan fungsi pelayanan di kecamatan dan kelurahan belum optimal, karena belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya manusia dan pendelegasian kewenangan yang memadai.
2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan.
  - Tidak seimbangya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah

Kecamatan di luar pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

- Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
- Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal di promosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.
- Masih kurangnya infrastuktur jasa dan perdagangan, terutama dalam menampung kebutuhan PKL.

### 3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan.

- Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.

- Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
  - Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integratif.
  - Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
  - Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan, masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
  - Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.
4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
  - Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.

- Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

#### 5. Masalah Pendidikan, Kesehatan

- Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
- Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan rumah sakit yang belum profesional akibat praktek dokter ahli lebih memilihi berpraktek di rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.
- Manajemen pelayanan rumah sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (Jamkesda) dan pemegang askes.
- Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

#### 6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan.

- Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.

- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate kedepan.
- Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atoran* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa

penguatan basis nilai religiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.

- Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

#### 7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal.

- Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam pendapatan daerah Kota Ternate.
- Masih kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

#### 8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

## **2. Tahapan Pembangunan RPJM Kota Ternate Tahun 2013, Target Dan Capaian Kinerja Ekonomi Kota Ternate Tahun 2013**

Dalam upaya mewujudkan **Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”** atau **Bahari Berkesan** sebagai tujuan akhir



periodesasi, maka perlu disusun suatu pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang telah ditetapkan dalam 5 tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas disetiap tahapannya, untuk tahap pembangunan 2013 merupakan Tahapan pembangunan 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat pembangunan Kota Ternate terutama pada Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat. Tahap pembangunan 2013 mengutamakan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif, dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Disamping itu juga untuk peningkatan ekonomi rakyat dilakukan pengembangan koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar serta menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka *unskill*, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.

Pembangunan di tahun 2013 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (Dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap III, antara lain :

- 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif;** yang diarahkan peningkatan pada terwujudnya *good government*, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.

**2. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;** yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*).

Disamping melaksanakan penguatan pada 2 program prioritas tahun 2013 Pentahapan RPJM Kota Ternate 2011-2015, juga telah terimplementasi sejumlah program/kegiatan SKPD untuk 9 Program Prioritas lainnya yang bersifat strategis dan populis, yang secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate di tahun 2013. Sebagaimana penjelasan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Kinerja Ekonomi Makro Kota Ternate  
Tahun 2013

| NO | INDIKATOR EKONOMI            | TAHUN 2012       | TAHUN 2013*      |
|----|------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi          | 8.09 %           | 8.23%            |
| 2. | Inflasi                      | 3.29 %           | 9,78 %           |
| 3. | Pendapatan Perkapita         | Rp. 3.141.764,-  | Rp. 3.250.601,-  |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7.26 %           | 4,85%            |
| 5. | PDRB Harga Berlaku           | Rp. 1,32 Trilyun | Rp. 1,38 Trilyun |

\*) angka Sementara

Capaian ini menjelaskan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD tahun anggaran 2013, telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro di 9 sektor PDRB Kota Ternate.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara nominal maupun riil dialami Kota Ternate pada tahun 2013. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 tercatat 1,38 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 1,32 triliun rupiah.

Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita Ternate pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.141.764,- meningkat menjadi Rp. 3.250.601,- pada tahun 2013.

Pergerakan inflasi tahunan (*year on year*) Kota Ternate mengalami peningkatan pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 9,78 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar 3,29 persen.

Inflasi tahunan Kota Ternate disumbang oleh tiga kelompok utama yaitu kelompok perumahan, listrik, gas dan air bersih sebesar 3,35 persen dengan tingkat inflasi 12,14 persen, kelompok bahan makanan 2,71 persen dengan tingkat inflasi 9,32 persen, dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan (2,00 persen), yang mengalami inflasi tahunan tertinggi diantara kelompok barang dan jasa sebesar 13,97 persen. Sementara sumbangan terkecil berasal dari kelompok kesehatan (0,09 persen) dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,59 persen. Sedangkan kelompok barang dan jasa lainnya memberikan sumbangan dibawah 1 persen dengan tingkat inflasi tahunan yang variatif yaitu berkisar antara 4,96 persen hingga 9,56 persen.

Faktor penyebab terjadinya inflasi di penghujung tahun 2013 masih berasal dari perayaan hari raya Natal dan tahun baru serta peralihan musim yang menyebabkan naiknya tinggi gelombang di perairan Maluku Utara, yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan, dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (*volatile foods*) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu, memang seringkali menjadi lokomotif terakselerasinya inflasi di Kota Ternate baik secara tahunan, triwulan maupun bulanan.

Berdasarkan kelompoknya, peningkatan harga tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 3,84 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat 8,73 persen. Dimana inflasi tertinggi terjadi pada komoditas ikan segar dan padi-padian, umbi-umbian serta hasilnya yaitu masing-masing 25,28 dan 3,23 persen. Hal ini didorong oleh kondisi musim yang mengalami peralihan dari akhir triwulan IV 2013, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi sektor perikanan dan bermuara

pada naiknya harga baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kelompok lain yang mengalami inflasi adalah kelompok sandang (2,65 persen), kelompok pertanian, rekreasi dan olah raga (1,65 persen), dan kelompok makanan jadi minuman, rokok dan tembakau (0,55 persen). Disatu sisi, ada kelompok yang mengalami deflasi yang berkisar antara minus 0,13 persen hingga minus 1,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Ternate selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2010–2013) menunjukkan peningkatan yang positif. Jika pada tahun 2010 LPE Kota Ternate mencapai 7,99%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 8,23%. Tingkat LPE Kota Ternate ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Ternate relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Selama periode 2010-2012, rerata LPE Kota Ternate mencapai 8,09%, sedangkan rerata LPE nasional secara periode 2008-2012 hanya berada di kisaran 5,89%.

Dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi diperlukan kehati-hatian karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan merupakan jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila pola pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan nilai tambah semata tanpa memperhatikan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan kerja yang baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan meningkatkan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh upah yang memadai untuk hidup secara layak. Pengangguran dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Ternate. Penurunan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan dialami Ternate, TPT di Kota Ternate tahun 2012 yang tercatat sebesar 7,26 persen (hasil Sakernas Agustus 2012) menurun drastis menjadi 4,85 persen pada Agustus 2013. Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan dalam tahun 2013, dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah Kota Ternate dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain melalui kerjasama investasi dalam pembangunan Ternate Wonder Island (*Water Boom*) dan kerjasama dengan Lippo Grup melalui pembangunan Hypermart, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, hal ini juga mendorong pemasaran berbagai komoditas lokal, oleh karena itu kedepan pengembangan investasi di Kota Ternate akan tetap dilanjutkan, dan hal tersebut menjadi tuntutan dan kewajiban kita semua untuk tetap menciptakan iklim dunia usaha dan investasi untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu mengangkat kualitas manusia yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia pada umumnya. Penduduk yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan sehingga mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit berdasarkan tiga kriteria yaitu : 1) Angka Harapan Hidup untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, 2) Angka Melek Huruf Dewasa dan Rata-rata Lama Sekolah untuk mengukur tingkat pendidikan dan 3) Paritas Daya Beli untuk mengukur tingkat kesejahteraan. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah negara, propinsi maupun kabupaten/kota. IPM dan komponen-komponen penyusun IPM dapat dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah.

Selama dua tahun terakhir Kota Ternate berhasil mencapai IPM tertinggi di Provinsi Maluku Utara yaitu 77,05 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 77,62 pada tahun 2012. Dari gambaran pencapaian IPM tersebut terdapat pola yang jelas bahwa daerah yang relatif maju secara sosial ekonomi dibandingkan daerah lain mempunyai nilai IPM yang relatif tinggi.

Selain melihat capaian pembangunan berdasarkan indikator ekonomi makro, juga dapat dilihat berdasarkan *assessment* Pencapaian Pembangunan Berbasis *Millenium Development Goals* (MDGs), yang dilakukan oleh Bappeda Kota Ternate bekerjasama dengan Pusat Studi Pengembangan Sumber Daya dan Konservasi Fakultas Pertanian Universitas Khairun, menggambarkan bahwa dari 25 indikator MDGs yang dianalisis menunjukkan pencapaian, sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) indikator telah mencapai target, yaitu Proporsi Penduduk Miskin dibawah garis kemiskinan nasional, Prevalensi Malnutrisi Anak, Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Bayi, Cakupan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan, Rasio Kawasan Tertutup Pepohonan, Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Bersih Layak, dan Akses Terhadap Sanitasi Layak.
2. 9 (sembilan) indikator menuju arah pencapaian target, yaitu Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun, Rasio Melek Huruf Perempuan Usia 15-24 tahun, Prevalensi Tuberculosis dan Proporsi Kasus TB Yang Diobati dan Sembuh.
3. 6 (enam) indikator yang masih jauh dari arah pencapaian target, yaitu Rasio Partisipasi Murid Perempuan SMP dan SMA, Proporsi Perempuan di DPRD, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Prevalensi HIV/AIDS, Angka Kejadian Malaria, dan Proporsi Yang Terdeteksi.



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **1. VISI**

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Kota Ternate, berpedoman pada Visi-Misi dan 11 Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Ternate, dengan Visi yaitu:

**TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA “BERBUDAYA, AGAMAS, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.**

##### **2. MISI**

Misi merupakan instrumen penting untuk menjabarkan Visi Kota Ternate 2011-2015, maka Misi Kota Ternate meliputi :

1. Mewujudkan Ternate Yang Agamis.
2. Mewujudkan Pemerataan Sarana Dan Prasarana Perekonomian Yang Lebih Representatif.
3. Membangun Ternate Sebagai Kota Pesisir Berbasis Lingkungan.
4. Membangun Ternate Sebagai Kota Pariwisata Berciri Budaya Dan Bahari.
5. Membangun Ternate Sebagai Kota Terbuka, Demokratis dan Adil.
6. Membangun Ternate Yang Sehat Dan Sejahtera.

#### **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Ternate dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate 2011-2015, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah meliputi :

## **1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Pertama**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Pertama** :

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

## **2. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Dua**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Dua** :

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif.

## **3. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tiga**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tiga** :

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin.

## **4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Empat**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Empat** :

Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat,

strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Menetapkan *One Village One Program* dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari.

#### **5. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Lima**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Lima** :

Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

#### **6. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Enam**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Enam** :

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

**7. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tujuh**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tujuh** :

Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor.

**8. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Delapan**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Delapan** :

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Membangun pelayanan satu titik (*one stop services*), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

**9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sembilan**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sembilan** :

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

## **10. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sepuluh**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sepuluh** :

Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pembinaan kerukunan Antar Ummat Beragama, Antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

## **11. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sebelas**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sebelas** :

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Konstruktif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

### **C. PRIORITAS DAERAH**

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan dengan memperhatikan permasalahan khas perkotaan dan kondisi obyektif, maka program prioritas daerah mengacu pada 11 Program Prioritas Kota Ternate 2011-2015, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan

2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan
11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap

tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana kita ketahui untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah, maka faktor yang sangat penting adalah dengan tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, oleh karena itu segala upaya ditempuh oleh daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan di daerah, antara lain meliputi :

### **1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam tahun 2013 adalah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang meliputi antara lain :

#### **a. Kegiatan Intensifikasi**

1. Pendataan : adalah mendata objek-objek Pajak Daerah baru yang belum didata dan Wajib Pajak yang tidak aktif dengan tujuan untuk memperluas dan menambah potensi pajak Daerah. Serta update potensi objek pajak Daerah
2. Pendaftaran : adalah mendaftar objek-objek Pajak Daerah baru dengan tujuan untuk menerbitkan NPWPD, agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah potensi pajak dan retribusi daerah.



3. Penetapan : adalah mengadakan perhitungan dan menetapkan besaran nilai pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penagihan : adalah mengadakan penagihan kepada semua Wajib Pajak Daerah yang sudah terdaftar.
5. Pengawasan : adalah melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah atas kewajiban mereka dalam pembayaran Pajak Daerah dan ketaatan terhadap aturan Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dll).

b. Kegiatan Ekstensifikasi

1. Membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaannya.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak.
3. Melakukan kegiatan pengkajian atau survey ke daerah yang lebih maju dengan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Ternate untuk dapat mengetahui kemungkinan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang lain.
4. Mengikutsertakan aparat pengelola pendapatan dalam kegiatan seminar dan workshop, baik pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan lapangan terkait dengan objek-objek pajak Daerah.
6. Melakukan koordinasi secara berkala dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah.

## **2. Target Dan Realisasi Pendapatan**

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2013 sebesar Rp. 648.213.367.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 646.860.321.122,- atau 99,79% dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2013 sebesar Rp. 43.535.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 40.816.885.197,- atau 93,76%, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Pajak Daerah**

Adapun target pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 21.586.741.654,- atau 105,30 %.

#### **2. Retribusi Daerah**

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.671.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 12.769.697.677,- atau 81,49 %.

#### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 365.392.583,- atau 73,08 %.

#### **4. Lain-lain PAD Yang Sah**

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.864.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 6.095.053.283,- atau 88,80 %.

b. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 547.345.576.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 548.427.292.935,- atau 100,20 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak

Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2013 sebesar Rp. 33.500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 29.628.043.318,- atau 88,44 %.

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Adapun target bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.772.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 11.725.673.617,- atau 173,14%.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2013 sebesar Rp. 462.645.746.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 462.645.746.000 ,- atau 100 %.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2013 sebesar Rp. 44.427.830.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 44.427.830.000 ,- atau 100 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 57.332.791.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 57.616.142.990,- atau 100,49%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.350.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 6.340.685.608,- atau 86,26%.

## 2. Dana Penyesuaian

Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 49.722.791.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 51.240.275.000,- atau 103,05 %.

## 3. Penerimaan Lainnya

Adapun target penerimaan lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 260.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 35.182.382,- atau 13,53 %.

Secara jelas Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2013 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah  
Kota Ternate Tahun Anggaran 2013

| No Urut | URAIAN  | TARGET (Rp)            | REALISASI (Rp)         | %             |
|---------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1       | 2   | 3                      | 4                      | 5             |
| 1       | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                        |                        |               |
| 1.1     | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>43.535.000.000</b>  | <b>40.816.885.197</b>  | <b>93,76</b>  |
| 1.1.1   | Pendapatan Pajak Daerah                           | 20.500.000.000         | 21.586.741.654         | 105,30        |
| 1.1.2   | Pendapatan Retribusi Daerah                       | 15.671.000.000         | 12.769.697.677         | 81,49         |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 500.000.000            | 365.392.583            | 73,08         |
| 1.1.4   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 6.864.000.000          | 6.095.053.283          | 88,30         |
| 1.2     | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>547.345.576.000</b> | <b>548.427.292.935</b> | <b>100,20</b> |
| 1.2.1   | Dana Bagi Hasil Pajak                             | 40.272.000.000         | 29.628.043.318         | 73,57         |
| 1.2.2   | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak                       | -                      | 11.725.673.617         | #DIV/0!       |
| 1.2.3   | Dana Alokasi Umum                                 | 462.645.746.000        | 462.645.746.000        | 100,00        |
| 1.2.4   | Dana Alokasi Khusus                               | 44.427.830.000         | 44.427.830.000         | 100,00        |
| 1.3     | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>57.332.791.000</b>  | <b>57.616.142.990</b>  | <b>100,49</b> |
| 1.3.1   | Hibah   | 260.000.000            | -                      | -             |
| 1.3.2   | Dana Darurat                                      | -                      | -                      | -             |
| 1.3.3   | Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda Lainnya  | 7.350.000.000          | 6.340.685.608          | 86,26         |
| 1.3.4   | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 49.722.791.000         | 51.240.275.000         | 103,05        |
| 1.3.5   | Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya      | -                      | -                      | -             |
| 1.3.6   | Pendapatan Lainnya                                | -                      | 35.182.382             | #DIV/0!       |
|         | <b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>                    | <b>648.213.367.000</b> | <b>646.860.321.122</b> | <b>99,79</b>  |

### **3. Permasalahan Dan Solusi**

Adapun Permasalahan dan Solusi di Bidang Pendapatan dalam tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Permasalahan**

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya terhadap daerah.
2. Kurangnya koordinasi Dinas Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola pendapatan.
3. Kurangnya kualitas petugas (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Kurangnya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini PPNS terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan daerah.
6. Data base sumber-sumber pendapatan yang belum akurat.

#### **b. Solusi**

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi secara intens, serta menegakkan dan menerapkan sanksi yang tegas (sesuai ketentuan) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang sengaja melalaikan kewajibannya.
2. Meningkatkan koordinasi yang intensif bagi SKPD pengelola pendapatan asli daerah dengan melakukan evaluasi penerimaan dan strategi pengawasan PAD setiap triwulan
3. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan lokakarya yang terkait dengan peningkatan pendapatan

daerah serta melakukan *in house training* seperti sosialisasi, pembekalan dan penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan aturan-aturan yang berlaku kepada petugas secara berkala.

4. Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) untuk kelancaran kegiatan penagihan Pajak Daerah.
5. Mengaktifkan kembali wadah PPNS dan meningkatkan pengawasan dari PPNS terhadap pelanggaran Perda oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Penyusunan data base pendapatan yang akurat, dengan melakukan pendataan dan peremajaan data potensi objek pajak secara berkesinambungan

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2013, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2013 sebesar Rp. 680.242.853.875,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 644.517.985.663,- atau 94,75 % dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Adapun Belanja Tidak langsung dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp. 354.213.142.502,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 341.025.856.876,- atau 96,28% dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja tidak langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 336.258.336.002,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 328.503.468.686,- atau 97,69 % dari total anggaran.
- Belanja Bunga tahun 2013 dianggarkan Sebesar Rp. 333.000.000,-.dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 218.856.504,- atau 65,72 % dari total anggaran.
- Belanja Hibah dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 4.882.806.500,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 4.674.102.000,- atau 95,73% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan sosial dalam tahun 2013 dianggarka sebesar Rp. 5.200.500.000.- dengan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp. 2.011.925.536,- atau sebesar 38,69% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 538.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 495.935.180,- atau sebesar 92,09%.
- Belanja Tidak terduga pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.121.568.970,- atau sebesar 73,17%.



#### b. Belanja Langsung

Adapun belanja Langsung dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp. 326.029.711.373,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 303.492.128.787,- atau 93,08 % dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 54.121.718.800,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 50.906.858.540,- atau 94,06% dari total anggaran.
- Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 136.134.089.609,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 125.502.676.612,- atau 92,19% dari total anggaran.
- Belanja Modal dalam tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 135.773.902.964,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 127.082.593.635,- atau 93,60 % dari total anggaran.

### 3. Permasalahan Dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat dan cenderung berubah-ubah, menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.
2. Tuntutan dan kebutuhan alokasi belanja dari masing-masing satuan kerja belum dapat dipenuhi secara optimal.
3. Sebagian komponen belanja yang terdapat pada standar belanja (*chek price*) tidak sesuai dengan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

b. Solusi

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut terhadap kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan agar secara bertahap dapat dipenuhi kebutuhan belanja dari satuan kerja.
3. Perlu mensinkronkan standar belanja (*chek price*) dalam penyusunan RKA-SKPD dengan mengantisipasi kemungkinan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib tahun 2013, terdiri dari 295 program dan 1.624 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan, terdiri dari 20 program dan 174 kegiatan
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan, terdiri dari 15 program dan 85 kegiatan
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari 17 program dan 109 kegiatan
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan, terdiri dari 6 program dan 26 kegiatan
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 8 program dan 47 kegiatan
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari 10 program dan 61 kegiatan
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan, terdiri dari 12 program dan 58 kegiatan
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari 12 program dan 70 kegiatan
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari 7 program dan 26 kegiatan
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari 6 program dan 29 kegiatan

- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial, terdiri dari 10 program dan 25 kegiatan
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari 4 program dan 12 kegiatan
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 7 program dan 33 kegiatan
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, terdiri dari 9 program dan 49 kegiatan
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 7 program dan 41 kegiatan
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari 16 program dan 68 kegiatan
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari 102 program dan 547 kegiatan
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian, terdiri dari 5 program dan 50 kegiatan
- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari 7 program dan 33 kegiatan
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan, terdiri dari 7 program dan 46 kegiatan

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan wajib sampai akhir tahun 2013, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 301.325.597.414,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 279.805.247.105,- atau 92,86 %, yang meliputi urusan wajib sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.086.295.155,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 42.407.792.033,- atau 98,43%

- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.955.601.201,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 9.529.677.667,- atau 95,72 %
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.067.399.840,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 72.951.743.318,- atau 93,45 %
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.838.794.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 2.102.573.168,- atau 74,07%
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.994.995.700,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.5.895.319.785,- atau 98,34%
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.473.550.400,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 7.313.460.499,- atau 97,86 %
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.897.127.500,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 6.255.844.155,- atau 90,70%
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.160.652.501,- realisasi sampai akhir tahun Rp. 14.869.766.799,- atau 92,01%
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.660.025.000,- realisasi sampai akhir tahun Rp. 1.523.470.790,- atau 91,77%
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.756.650,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 868.357.795,- atau 95,03%
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp. 1.716.640.000,- realisasi sampai akhir tahun  
Rp. 1.699.315.397,- atau 98,99 %
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar  
Rp. 2.035.299.000,- realisasi sampai akhir tahun  
Rp. 1.931.982.521 ,- atau 94,92%
  - 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran  
sebesar Rp. 892.925.000,- realisasi sampai akhir tahun  
Rp. 841.254.800,- atau 94,21%
  - 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.129.559.950,- realisasi  
sampai akhir tahun Rp. 1.115.132.880,- atau 98,72 %
  - 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dengan alokasi anggaran  
sebesar Rp. 4.878.435.300,- realisasi sampai akhir tahun  
sebesar Rp. 4.326.062.923,- atau 88,68 %
  - 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi  
anggaran sebesar Rp. 2.882.308.600,- realisasi sampai akhir  
tahun sebesar Rp. 2.799.841.991,- atau 97,14 %
  - 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam  
Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.749.334.700,-  
realisasi sampai akhir tahun Rp. 9.694.964.600,- atau 99,44 %
  - 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum dengan alokasi  
anggaran sebesar Rp. 87.698.058.317,- realisasi sampai akhir  
tahun Rp. 77.447.727.123,- atau 88,31 %
  - 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian dengan alokasi anggaran  
sebesar Rp. 7.083.112.200,- realisasi sampai akhir tahun  
sebesar Rp. 6.841.157.782,- atau 96,58 %
  - 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.574.625.800,- realisasi  
sampai akhir tahun sebesar Rp. 6.917.074.162,- atau 91,32%

- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.626.197.600,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 1.565.030.167,- atau 96,24 %.
- 22) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.010.903.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 907.696.750,- atau 89,79 %.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Belum adanya keterpaduan regulasi urusan wajib antara kementerian dengan pemerintah daerah, menimbulkan tumpang-tindih kebijakan program.
- 2) Pelaksanaan urusan wajib yang umumnya meliputi kebijakan pelayanan dasar, belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan alokasi anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat.

#### **b. Solusi**

- 1) Perlu adanya keseragaman kebijakan regulasi urusan wajib, sehingga terwujud sinergitas program pusat dan daerah.
- 2) Perlu adanya batasan kewenangan yang jelas antar tingkat pemerintahan, sehingga pelaksanaan urusan wajib lebih optimal.

## **B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan tahun 2012 terdiri dari 54 program dan 203 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian, terdiri dari 21 program dan 79 kegiatan

- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan, terdiri dari 4 program dan 11 kegiatan
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 13 program dan 49 kegiatan
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, terdiri dari 8 program dan 30 kegiatan
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian, terdiri dari 8 program dan 34 kegiatan

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan pilihan sampai akhir tahun 2013, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 24.704.113.959,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 23.686.881.682,- atau 95,88% yang meliputi urusan pilihan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.470.071.385,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 7.419.993.958,- atau 99,33%
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 767.525.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 760.170.000,- atau 99,04 %
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.786.250.070,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 1.081.441.000,- atau 60,54 %
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.189.650.400,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 9.045.728.562,- atau 98,43%



- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.265.257.504,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 2.185.532.563,- atau 96,48%
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.225.359.600,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 3.194.015.599,- atau 99,03%

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Kurangnya koordinasi dan adanya perbedaan kebijakan regulasi pusat-daerah dalam kebijakan urusan pilihan.
- 2) Sering terjadi satu SKPD melaksanakan 2 (dua) urusan wajib dan pilihan sekaligus, sehingga selain tidak efisien juga sering menimbulkan kesulitan dalam klasifikasi belanja.
- 3) Urusan pilihan pada umumnya meliputi kegiatan strategis dan potensial yang bernilai investasi, namun dalam pelaksanaannya belum menyentuh tujuan dan sasaran yang dimaksud.

#### **b. Solusi**

- 1) Perlu adanya sinergitas kebijakan program urusan pilihan pusat-daerah serta keseragaman regulasi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program/kegiatan urusan pilihan.
- 2) Pelaksanaan urusan pilihan perlu didukung dengan aspek kelayakan usulan program/kegiatan, sehingga mampu mendatangkan nilai tambah bagi investasi daerah.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian /Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

#### **1. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa,

serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan pada hakekatnya dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kepedulian/intervensi pemerintah terhadap daerah melalui kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2013 mendapat tugas pembantuan dari 5 (lima) kementerian/lembaga.

## **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2013, dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- d. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- e. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

## **3. Satuan Tugas Perangkat Daerah Yang Melaksanakan**

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
- c. Dinas Kesehatan Kota Ternate

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

#### **4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya**

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Program Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan berupa kegiatan padat karya infrastruktur, dan kegiatan layanan Perkantoran.

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Program Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan Tangkap dengan kegiatan berupa Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Produksi Hasil Perikanan Non Konsumsi, serta Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (P2HP).

- c. Dinas Kesehatan Kota Ternate

Program Upaya pembinaan kesehatan dengan kegiatan berupa diarahkan pada Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Kegiatan Untuk Puskesmas, Manajemen Dinas BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan Jampersal Untuk Puskesmas dan BPS (Bidan Praktek Swasta).

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Program Pengembangan sarana distribusi dengan dengan kegiatan berupa Pembangunan Pasar Percontohan.

- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

Pembangunan Revitalisasi kawasan Pantai dengan kegiatan berupa Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Pantai Sulamadaha.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

### **a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate**

Sumber dana untuk 2 (dua) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 306.625.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

### **b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 4 (Empat) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar dengan total anggaran sebesar Rp. 3.794.170.000,- realisasi hingga akhir tahun 100 %.

### **c. Dinas Kesehatan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 3 (Tiga) kegiatan di Dinas Kesehatan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.450.831.000,-, dan realisasi hingga akhir tahun 100%.

### **d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.785.087.000.- dan realisasi hingga akhir tahun 2013 sebesar 60% dan telah dibuat addendum dan perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan 19 Februari 2014.

### **e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate**

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000.- dan realisasi hingga akhir tahun 100%.

## 6. Permasalahan Dan Solusi

### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada umumnya masih tetap sama dengan tahun-tahun yang lalu, meliputi :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas pembantuan yang masih terbatas.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai.
3. Urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan cenderung seragam untuk seluruh Daerah dan Desa tanpa memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Desa.
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan pada umumnya belum didasarkan atas analisis kebutuhan penggunaan sumber-sumber daya dan perencanaan operasional yang dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraannya.
5. Inisiatif tugas pembantuan selama ini selalu datang dari pihak pemberi tugas, belum membuka peluang inisiatif dari pihak penerima tugas.

### b. Solusi

Solusi terhadap berbagai permasalahan tugas pembantuan, meliputi :

1. Pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan harus juga meliputi komponen sarana dan prasarana pendukung.
2. Perlu disertai dengan pembiayaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai pelaksana tugas pembantuan di tingkat operasional.
3. Perlu ada penyesuaian terhadap objek urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan dengan melihat kebutuhan dan karakteristik wilayah.

4. Perlu ada kajian-kajian teknis yang komprehensif atas kelayakan kegiatan pada masing-masing wilayah.
5. Perlu diberikan ruang atau akses yang seluas-luasnya bagi pengambilan inisiatif pelaksanaan tugas pembantuan dari pihak penerima, terutama pada Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

Untuk tugas pembantuan yang diberikan sesuai mekanisme tugas pembantuan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Kabupaten/Kota ke Desa dan tidak ada tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan. Namun demikian, seiring dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan serta dalam rangka merangsang partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, secara internal Pemerintah Kota Ternate menempuh kebijakan melalui bantuan dana Partisipatif dan dan bantuan Stimulan lainnya bagi Kecamatan dan Kelurahan yang secara tidak langsung merupakan bagian pelaksanaan tugas pembantuan.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

##### **1. Kebijakan Dan Kegiatan**

Dalam rangka memberdayakan potensi daerah di tengah-tengah kemajuan dan kemampuan masing-masing daerah yang tidak sama, maka perlu ada kerjasama antar daerah di berbagai bidang. Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2013, antara lain :

Kerjasama Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI) baik Nasional maupun APEKSI KOMWIL VI Kawasan Timur Indonesia, dengan realisasi Kegiatan berupa :

1. Rakerwil APEKSI Komwil VI SUMMAPAPUA dengan pokok bahasan masalah Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Daerah terutama di sektor pariwisata tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 2013 di Kota Ternate
2. RAKERNAS ke-9 APEKSI tanggal 07 Mei 2013 di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
3. Workshop APEKSI di Swiss Bell Hotel Ambon tanggal 5 September 2013
4. Workshop City Network SULTAN SAPAKU Part 3 di Kota Makassar Sulawesi Selatan tanggal 13 November 2013.

Disamping itu Pemerintah Kota Ternate juga menjalin kerjasama antar daerah, melalui Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), dengan realisasi Kegiatan berupa :

Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-III di Blitar Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2013.



## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **1. Kebijakan Dan Kegiatan**

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, maka Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga, meliputi :

1. Kerjasama Pemkot dengan PT. Taspen Cabang Ternate, dengan realisasi berupa MoU tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan (SIP) gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif.
2. Kerjasama Pemkot Ternate dengan PT. Lippo Group dengan realisasi berupa investasi dalam bentuk bangun, guna dan pakai.
3. Kerjasama Pemkot Dengan KPP Pratama, dengan realisasi kegiatan Kerjasama bidang perpajakan ini berkaitan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak penghasilan, pengawasan kewajiban perpajakan berbendaharawan dan pengelolaan PBB dan BPHTB.
4. Kerjasama Pemkot dengan Universitas Khairun, Universitas Muhamadiyah Maluku Utara, IAIN, dan Universitas Muslim Indonesia, dalam rangka peningkatan SDM melalui Program Magister, yang direalisasikan dengan mengikutsertakan pegawai Pemerintah Kota Ternate dalam menempuh pendidikan Program Magister di Universitas Khairun, Universitas Muhamadiyah Maluku Utara dan IAIN serta program Doktor di Universitas Muslim Indonesia Makassar.
5. Kerjasama Pemkot dengan Universitas Khairun dan Muhammadiyah dalam bidang Penelitian

## **C. KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

### **1. Kebijakan**

Koordinasi dengan instansi vertikal disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahannya, sehingga bentuknya dapat berupa forum koordinasi pimpinan daerah, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat teknis, rapat biasa, koordinasi dalam hal pemungutan pajak pusat yang ada di daerah, bantuan keuangan dan kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan tim asistensi dalam suatu kegiatan dan bentuk-bentuk koordinasi lainnya. Sedangkan permasalahan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Ternate kepada instansi vertikal yang berada di Ternate, meliputi masalah :

- a. Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama
- c. Konsultasi peraturan-perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal
- d. Penyelesaian suatu kasus/masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal tertentu
- e. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
- f. Pengembangan SDM
- g. Penerimaan keuangan Negara
- h. Pembiayaan
- i. Ipoleksosbudhankam

### **2. Realisasi Kegiatan**

Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2012, antara lain dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) *Coffe break* di kelurahan, yaitu kegiatan bulanan berupa tatap muka walikota beserta Kapolres dan Dandim dengan warga di

tingkat kelurahan untuk mengetahui perkembangan kondisi keamanan sekaligus mendengarkan keluhan dan aspirasi warga.

- 2) Rapat koordinasi dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional dan keagamaan.
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang KDRT, Undang-undang Lalu lintas dan lain-lain
- 4) Koordinasi dengan KPP Pratama dalam rangka kelancaran pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
- 5) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan event nasional seperti di Kota Ternate.
- 6) Koordinasi dengan Pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pemerintahan Kota Ternate.
- 7) Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate dengan PPE Regional SUMAPAPUA terkait Penilaian Kota Sehat/Adipura, kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - a. Rapat teknis pemantauan Adipura
  - b. Rapat/koordinasi ekspose hasil pemantauan Adipura
  - c. Rapat/koordinasi kerja bakti bersama
  - d. Rapat/koordinasi pembentukan tim koordinasi Adipura
- 8) Koordinasi Badan Pengendalian Kependudukan dan KB Kota Ternate dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
  - a. Rapat Kerja Daerah Program KB
  - b. Rapat Evaluasi Program KB
  - c. Bhakti Sosial Dengan Mitra Kerja (melibatkan TNI-POLRI)
  - d. Koordinasi Kegiatan KS
- 9) Koordinasi oleh Badan KESBANGPOL-LINMAS Kota Ternate dengan TNI- POLRI dalam memfasilitasi pembentukan

lembaga ekstra (sesuai Keputusan Walikota Ternate) yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur terkait, baik pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM /NGO, Perguruan Tinggi maupun *stakeholder* lainnya termasuk instansi vertikal maupun TNI dan POLRI. Lembaga ekstra yang dibentuk antara lain :

- a. Forum Koordinasi antar Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate (berdasarkan Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006);
  - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006) ;
  - c. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010);
  - d. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011);
  - e. Satuan Tugas (SATGAS ) Kewilayahan Kota Ternate (sesuai Keputusan Walikota Ternate Nomor 162 / III.6 / KT / 2010 Tahun 2010.
- 10) Koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Maluku Utara, melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Daerah.

#### **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

Pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Batas wilayah merupakan hal yang penting terutama kaitannya dengan pemekaran dan penghapusan wilayah/daerah,

karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti sehingga menghindari terjadinya konflik yang timbul karena adanya ketidakjelasan batas wilayah.

Kota Ternate tidak memiliki batas darat dengan daerah lain. Wilayah Kota Ternate dibatasi oleh laut Maluku dan Selat Halmahera. Batas darat antar kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara berjumlah 8 segmen batas dan Kota Ternate tidak termasuk dalam 8 segmen tersebut, jadi dapat dikatakan batas wilayah Kota Ternate hingga saat ini tidak bermasalah atau bersengketa dengan daerah lain.

Pembinaan batas wilayah tidak hanya terbatas pada batas antar daerah, tetapi dimulai dari wilayah pemerintahan terendah dalam hal ini batas wilayah kelurahan, karena batas kelurahan sekaligus menjadi batas wilayah pemerintahan yang lebih tinggi yaitu batas kecamatan, batas kabupaten/kota, batas provinsi dan batas negara.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Ternate membentuk tim penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan melalui Keputusan Walikota Ternate Nomor 136/1.1/KT/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate Tahun 2012. Tim penegasan terdiri dari unsur Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan), BPN, BAPPEDA, Dinas PU, KPP Paratama serta para camat dan lurah. Tim tersebut melaksanakan tugas :

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.
- b. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penetapan serta penegasan batas kecamatan dan kelurahan.
- c. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses serta hasil kerja tim.
- d. Merekomendasikan peta batas daerah kepada walikota untuk ditandatangani, dan

e. Melaporkan semua tahap kegiatan kepada walikota.

Tahapan penegasan batas wilayah di darat berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, meliputi :

- a. Penelitian dokumen
- b. Pelacakan batas
- c. Pemasangan pilar batas
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas
- e. Pembuatan peta batas

Tim penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan melakukan penelitian dokumen dengan meneliti dasar hukum pembentukan kelurahan dan kecamatan. Secara umum batas wilayah kelurahan dan kecamatan memang telah tertuang pada peraturan daerah pembentukan kecamatan dan kelurahan, namun dari pelacakan batas di sejumlah kelurahan dan kecamatan masih ditemui ketidakjelasan batas. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis, batas wilayah kecamatan/kelurahan telah ditetapkan dalam peraturan daerah pembentukan kecamatan/kelurahan, namun secara fisik di lapangan masih terjadi tarik menarik batas wilayah antar warga di wilayah perbatasan.

Dari penelitian dokumen dan pelacakan batas di lapangan tim telah menginventarisir beberapa segmen batas kecamatan/kelurahan yang bermasalah, sebagaimana yang terurai pada tabel berikut :

## DATA PERMASALAHAN BATAS WILAYAH KOTA TERNATE

| No | Segmen Batas Kecamatan dan Kelurahan Yang Bermasalah |                                |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Kecamatan Pulau Ternate                              | Kecamatan Kota Ternate Utara   |
| 2. | Kecamatan Pulau Ternate                              | Kecamatan Kota Ternate Selatan |
| 3. | Kelurahan Kulaba                                     | Kelurahan Tarau                |
| 4. | Kelurahan Jambula                                    | Kelurahan Sasa                 |
| 5. | Kelurahan Toboko                                     | Kelurahan Tanah-tinggi         |
| 6. | Kelurahan Ngade                                      | Kelurahan Kalumata             |
| 7. | Kelurahan Salero                                     | Kelurahan Kasturian            |
| 8. | Kelurahan Sulamadaha                                 | Kelurahan Tobololo             |
| 9. | Kelurahan Sulamadaha                                 | Kelurahan Takome               |

Selain menginventarisir segmen batas yang bermasalah, Hingga tahun 2013 tim telah melakukan pemasangan pilar survey batas wilayah pada 100 segmen batas kelurahan dan empat segmen batas kecamatan yang telah memiliki batas fisik yang jelas di lapangan. Kegiatan pembinaan batas kecamatan dan kelurahan dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya tim penegasan akan melanjutkan tahapan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan pada tahun 2014 dan menargetkan terselesaikannya konflik batas pada sembilan segmen batas di atas. Ketidakjelasan batas hingga saat ini belum menjadi permasalahan akut yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

### **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Cuaca Ekstrim di wilayah Kota Ternate disertai dengan curah Hujan yang cukup tinggi yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2013, pukul 19.00 WIT berakibat Banjir Rob atau meluapnya air permukaan, sehingga berdampak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat Kota Ternate. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan

korban jiwa tetapi mengakibatkan kerugian harta benda bagi masyarakat sekitarnya dan juga rusaknya sarana dan prasarana umum yang telah terbangun, terputusnya akses jalan akibat gerusan air, infrastruktur jembatan perkotaan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana permukiman bahkan perkebunan rakyat, di sebagian besar wilayah Kota Ternate yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Hiri dan Kecamatan Moti. Rusaknya tanggul-tanggul penahan tanah, daerah aliran sungai, pendangkalan akibat sedimentasi, erosi, pengikisan air terhadap dinding sungai bahkan terbawanya kembali sisa-sisa material vulkanik hasil erupsi Gunung Gamalama oleh arus luapan banjir. Wilayah yang paling parah dilanda bencana banjir yaitu di Kec. Moti khususnya di Kelurahan Tafamutu dan Takofi. Banjir di wilayah tersebut berupa banjir bandang disertai dengan bebatuan akibat erosi.

Berdasarkan survey yang dilakukan BPBD Kota Ternate, bahwa kemungkinan ancaman banjir serupa masih berpotensi terjadi, antisipasi sedini mungkin perlu dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi di kemudian hari.

Oleh karena itu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate, antara lain normalisasi sungai dan revitalisasi barangka, perbaikan talud, jalan dan jembatan serta sosialisasi dan relokasi perumahan warga pada kawasan yang aman.

## **F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

Sejalan dengan pertumbuhan Kota Ternate yang terus meningkat, maka berkembang pula beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis karena merupakan sentra-sentra jasa dan perekonomian, oleh karena itu agar kawasan-kawasan strategis tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap terjaga nilai ekonomisnya, maka dalam



tahun 2012 telah di keluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032.

## **G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Secara umum pada tahun 2013 situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate relatif kondusif, meskipun masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang digulirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga sering menimbulkan ketegangan bagi masyarakat. Beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan selama ini dapat diatasi, namun demikian stabilitas dan kondisi keamanan daerah perlu tetap mendapat perhatian, untuk menjamin kenyamanan masyarakat luas dalam melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi.

### **1. Gangguan Yang Terjadi**

- a) Eskalasi kejadian pertikaian masyarakat/pemuda antar kampung di Kota Ternate pada tahun 2013 dapat dikatakan mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat sebanyak 18 kasus tawuran.
- b) Gangguan atau konflik berbasis SARA yang terjadi adalah munculnya kelompok aliran keagamaan, yang pada awal penyebarannya dibungkus dengan penamaan ajaran Syiah, namun sesungguhnya aliran ini bertentangan dengan ajaran Islam Syiah itu sendiri sehingga akhirnya tidak diakui bahkan sudah ditentang oleh sebagian besar masyarakat.
- c) Adapun gangguan lain yang cukup menonjol dan meresahkan warga masyarakat diantaranya adalah maraknya peredaran minuman keras dan judi.

## **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Lembaga teknis yang mengemban Tugas dan Fungsi penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum pada lingkup Pemerintah Kota Ternate adalah Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang tentunya dalam penugasan tersebut senantiasa dikoordinasikan bersama aparat POLRES Ternate, KODIM 1501 Ternate dan instansi lainnya, baik dengan melakukan penertiban maupun berbagai razia terhadap kegiatan yang dapat mengarah pada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

## **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan**

Adapun jumlah personel dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 66 pegawai, yang terdiri dari personel di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebanyak 35 pegawai dengan, dan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 31 pegawai.

## **4. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Adapun sumber dan jumlah anggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2013 dengan total nilai anggaran Rp. 12.990.551.150,-.

## **5. Penanggulangan Dan Kendalanya**

✓ Terhadap kasus pertikaian antara warga yang terjadi, Pemerintah Kota Ternate dalam penanganan dan penanggulangannya senantiasa melakukan koordinasi bersama aparat keamanan (POLRES Kota Ternate) yang secara langsung melerai kelompok yang bertikai sekaligus menempati dan menjaga titik-titik rawan terutama areal batas antara Kelurahan. Upaya selanjutnya adalah memfasilitasi pertemuan

antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda guna membuat kesepakatan dan perjanjian damai dengan ketentuan pemberian sanksi tegas jika masih ada diantara pihak-pihak yang mencoba mengulangi atau membuat masalah. Dalam penyelesaian masalah lapangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum masih sering ditemukan kendala karena kurangnya kesadaran warga dalam menyaring informasi negatif sehingga sangat rentan terhadap isu dan mudah terprovokasi.

- ✓ Terhadap kasus penyebaran ajaran agama telah dilakukan koordinasi bersama Kantor Departemen Agama Kota Ternate dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate dalam upaya mendudukkan permasalahan ajaran yang sesuai dengan kaidah, norma dan fiqih berdasarkan Syariat Islam, selain itu juga dilakukan pendekatan kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka menciptakan situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
- ✓ Terhadap penanganan peredaran minuman keras dan judi (Togel) juga senantiasa dilakukan koordinasi data dan informasi bersama pihak terkait untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Guna menindaklanjuti beberapa regulasi Pemerintah Pusat sekaligus sebagai upaya koordinatif dalam rangka memantau, mengkomunikasikan data dan informasi tentang perkembangan situasi dan isu strategis (kondisi IPOLEKSOSBUD-HANKAM) di Kota Ternate maka Badan Kesbangpol dan Linmas telah memfasilitasi pembentukan kelembagaan yang melibatkan unsur Pemerintah, POLRI, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, unsur Perguruan Tinggi dan Stakeholder dan unsur terkait lainnya, yaitu:

1. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Ternate;
2. Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate;
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate;
4. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate.
5. Satuan Tugas (SATGAS) Kewilayahan Kota Ternate.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2013 berupaya menggambarkan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak pembangunan kota dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang dicapai selama tahun 2013, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara memadai.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumberdaya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan kota harus terus bekerjasama dan sama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang, sehingga tercipta masyarakat dan Kota Ternate yang Berbudaya, Agamais, Harmoni, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini akan menjadi laporan awal tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebelum kita masuk pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang sesuai aturan normatif akan disampaikan setelah diperiksa oleh BPK, yang mencakup laporan nota perhitungan, aliran kas dan neraca daerah.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, sebagai bukti dan prasasti serta karya nyata bersama saudara-saudara anggota dewan yang terhormat, yang merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat dan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Dalam kaitan dengan itulah, Saya secara pribadi maupun atas nama Walikota bersama saudara Saya Wakil Walikota, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berlangsungnya kemitraan selama kurang lebih 5 (lima) tahun masa bakti dewan yang terhormat ini dapat berjalan harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dengan tujuan dan manfaat serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Kota Ternate, dan khusus bagi anggota dewan yang masih mencalonkan diri kembali, semoga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersama lagi pada periode masa bakti berikutnya, Insya Allah Amin.

Selanjutnya, menyikapi dinamika perkembangan sosial politik menjelang agenda Pemilihan legislatif bulan depan, Saya menghimbau kepada seluruh elite politik dan masyarakat luas untuk merespon agenda demokrasi ini dengan kearifan dan kedewasaan, hindari sikap arogansi dan anarkisme, sehingga proses ini dapat berjalan dengan aman dan lancar serta stabilitas kamtibmas dapat terjaga dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Pimpinan instansi vertikal maupun pihak ketiga, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini, demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melaksanakan amanat rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini.

Ternate, 11 Maret 2014

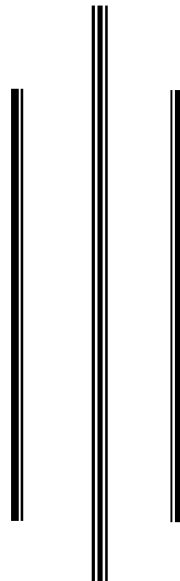
**WALIKOTA TERNATE**

**H. BURHAN ABDURAHMAN**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2013  
DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TERNATE**

***TANGGAL, 11 MARET 2014***



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**TAHUN 2014**